

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKIP )

**TAHUN ANGGARAN 2019**  
**KANTOR KECAMATAN MENTAWA BARU**



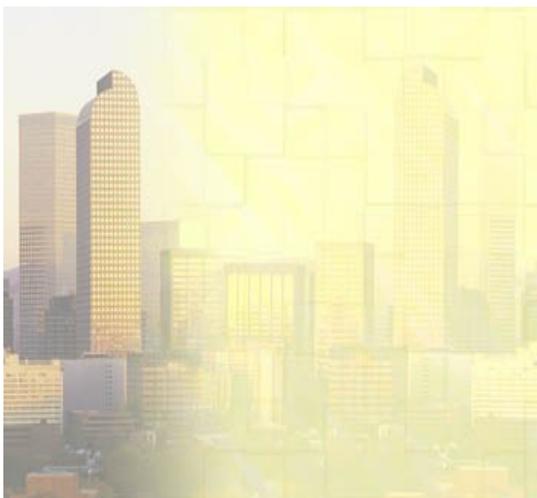
## KATA PENGANTAR

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik *good governance* serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP ) yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, professional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Berpedoman pada ketentuan – ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

Disusunnya LKIP ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada kantor Kecamatan Mentawa Baru Ketapang lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpola serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga mewujudkan *good governance*.

Dengan segala keterbatasan yang ada, semoga laporan ini dapat dijadikan dasar untuk perbaikan dan evaluasi terhadap misi, tujuan dan sasaran organisasi pada masa yang akan datang, karena itu saran, pertimbangan dan masukan yang positif dan konstruktif sangat diperlukan untuk penyempurnaannya.



Sampit, Januari 2020

**CAMAT MENTAWA BARU KETAPANG,**

**H. SUTIMIN, S.H.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19630602 199002 1 003



kinerja 4 (empat) sasaran indikator pencapaian target kerjanya telah memenuhi harapan sesuai target yang telah ditetapkan dengan demikian mencapai target kinerja yang sangat bagus dengan kategori “Berhasil “ yang didukung oleh program / kegiatan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, namun secara umum kinerja Kecamatan Mentawa Baru Ketapang “Berhasil “ dengan nilai **100 %**.

Pencapaian tersebut, sejauh ini menunjukkan adanya peningkatan kuantitatif dan kualitatif dari tahun ketahun, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

1. Belum optimalnya SDM aparatur pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurus surat pertanahan yang tertib administrasi
3. Kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan
4. Kurangnya peran aktif masyarakat dalam peningkatan prestasi dilingkungan Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Nasional
5. Penyakit masyarakat dilingkungan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang diantaranya warung remang-remang dan narkoba yang masih ada namun presentase berkurang dari tahun-tahun sebelumnya

Dalam upaya mengatasi permasalahan serta kendala – kendala tersebut maka diupayakan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan SDM/ ASN aparatur yang ada di lingkungan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan memberikan sarana prasarana dalam mengembangkan disiplin diri baik dalam penggunaan teknologi informasi maupun pelayanan kepada masyarakat;
2. Penyelesaian konflik pertanahan baik di tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat Kecamatan serta pembinaan untuk tertib administrasi dalam pengurusan surat-surat
3. Sejak tanggal 1 Oktober 2019 setiap registrasi pertanahan diwajibkan mencantumkan titik koordinat menggunakan GPS dan tahun 2019 direncanakan sudah menggunakan aplikasi pertanahan yang terkoneksi dengan BPN
4. Himbauan dan ajakan kepada masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan dan menyiapkan Tempat Pembuangan Sampah Sementara
5. Meningkatkan peran aktif masyarakat berprestasi dengan mengadakan lomba baik ditingkat Desa/ Kelurahan dan tingkat Kecamatan
6. Pembinaan dan Patroli bersama Koramil, Polsek, Satpol PP serta instansi terkait

iii

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 .....	15
Tabel2.2	Rencana Kinerja tahun 2019 .....	16
Tabel2.3	Penetapan Kinerja tahun 2019 .....	18
Tabel3.1	Kategori Pencapaian Kinerja .....	21
Tabel3.2	Analisa Sasaran 1 tahun 2019 .....	22
Tabel3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 .....	22
Tabel3.4	Program / Kegiatan penunjang Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan	

	Masyarakat tahun 2019 .....	23
Tabel3.5	Program / Kegiatan penunjang Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan	26
	Masyarakat tahun 2019 .....	
Tabel3.6	Analisa Sasaran 2 tahun 2019.....	26
Tabel3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 .....	27
Tabel3.8	Program / Kegiatan penunjang Pencapaian Indikator Kinerja Prosentase Desa /	
	Kelurahan yang telah selesai tata batas.....	27
Tabel 3.9	Program / Kegiatan penunjang Pencapaian Indikator Kinerja Prosentase Desa /	28
	Kelurahan yang tertib administrasi .....	
Tabel 3.10	Program / Kegiatan penunjang Pencapaian Indikator Kinerja Prosentase lembaga	
	perekonomian milikdesa .....	28
Tabel 3.11	Program / Kegiatan penunjang Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah PKK desa /	
	kelurahan aktif .....	29
Tabel 3.12	Analisa Sasaran 3 tahun 2019.....	29
Tabel 3.13	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 .....	30
Tabel 3.14	Program / Kegiatan penunjang Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya	
	ketentraman dan keamanan lingkungan.....	30
Tabel 3.15	Analisa Sasaran 4 tahun 2019.....	31
Tabel 3. 16	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran4 .....	31
Tabel 3. 17	Program / Kegiatan penunjang Pencapaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Kecamatan	
	MB Ketapang .....	32
Tabel 3.18	Realisasi Anggaran Kecamatan MB. Ketapang tahun 2019 .....	33
Tabel 3.19	Realisai Capaian Target Kinerja 4 Sasaran Kecamatan MB, Ketapang tahun 2019	36
	.....	

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>1</b>	SK TIM PENYUSUN LKIP
<b>2</b>	KERTAS KERJA EVALUASI
<b>3</b>	PERJANJIAN KERJA TAHUN 2019
<b>4</b>	FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
<b>5</b>	INDIKATOR KINERJA UTAMA
<b>6</b>	PERJANJIAN KERJA TAHUN 2019 ESSELON III DAN ESSELON IV
<b>7</b>	SOP PENYUSUNAN LKIP
<b>8</b>	HASIL EVALUASI AKIP KECAMATAN MB KETAPANG TAHUN 2019

## **V**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah di terbitkan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab. Pelaksanaan lebih lanjut berdasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara priodik.

Dalam mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja.

Pembenahan kinerja diharapkan mampu untuk meningkatnya peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintah daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang –undang Nomor 28 tahun 1988 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme, maka diterbitkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Mentawa Baru ketapang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tahun 2019 yang dimaksud sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang mencerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indicator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang adalah wilayah kerja Camat Mentawa Baru Ketapang sebagai perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang merupakan salah satu dari 17 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki luas wilayah ± 35.014,95 Ha dan jumlah penduduk per 31 Desember 2016 sebanyak 75.780. Wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang secara administrasi pemerintahan terdiri atas 11 Kelurahan/Desa (5 Kelurahan dan 6 Desa).

Perubahan status Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sebagai perangkat daerah dari sebelumnya sebagai perangkat wilayah didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

## **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA PERENCANAAN STRATEGIS KECAMATAN MWNTAWA BARU KETAPANG**

Urusan pemerintah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, serta Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 54 tahun 2016 tentang susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok. Fungsi serta Uraian Tugas Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Timur

Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang camat dengan tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menagani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintah

Adapun tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan meliputi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan /atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- b. penyusunan rencana dan program kerja yang meliputi rencana strategis kecamatan, rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan.
- c. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya yang diselenggarakan oleh semua instansi;
- d. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- h. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- i. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan

- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati.

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan meliputi:

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Sedangkan organisasi Kecamatan Mentawa Baru Ketapang masih mengacu pada Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor. 54 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan rincian tugas pokok, fungsi serta uraian tugas Kecamatan Kabupaten kotawaringin Timur, dimana struktur organisasi Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Pelaporan
  - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan
- c. Seksi Tata Pemerintah
- d. Seksi Pembangunan
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- g. Seksi Administrasi
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Rencana strategis kecamatan Mentawa Baru Ketapang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran visi dan misi Kepala daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, dalam hal ini Kecamatan Mentawa Baru ketapang. Sehubungan dengan dihapuskannya Rencana Strategis Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tahun 2016 – 2021 pada bulan Nopember 2016, sehingga Rencana Strategis yang digunakan sebagai acuan pada Laporan Kinerja Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, berdasarkan Surat Wakil Bupati Koatawaringin Timur Nomor 060/511/ORG.XI/2016 tanggal 01 Desember 2016 tentang penyusunan LKIP SKPD Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016

Recana strategis Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur.

Visi dan misi Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sebagai berikut :

## **I. Visi**

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan, merupakan langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang mau dicapai oleh

organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten pada Kecamatan Mentawa Baru Ketapang telah ditetapkan dengan rumusan yakni :

***“ Terwujudnya Masyarakat yang Madani, Dinamis, Mandiri dan Berdaya Saing dalam Suasana Religius, Kebersamaan, Aman dan Sejahtera “***

Diharapkan dengan terumuskannya visi Kabuapten Kotawaringin Timur, dapat menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sehingga visi Kecamatan Mentawa Baru Ketapang mengikuti visi Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja maupun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

## **2 Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat dilaksanakan dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, maka misi kabuapten Kotawaringin Timur tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

- **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak.**
- **Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumberdaya alam yang daerah dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan.**
- **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.**
- **Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta pariwisata dan budaya.**

**Dari 4 (empat) Misi Kabupaten Kotawaringin Timur** Kecamatan Mentawa Baru Ketapang adalah penjabaran dari misi Bupati Kotawaringin Timur ***“ Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien “*** dengan kebijakan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Untuk membangun komitmen dan keinginan dimaksud sesuai tugas, peran dan fungsi yang harus dilakukan, Pemerintah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) periode lima tahunan (2016–2021).

Sejalan dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kowaringin Timur dalam periode lima tahun yaitu rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dirumuskan dan dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan Otonomi Daerah guna mengantisipasi berbagai isu-isu yang diperkirakan terjadi baik yang berupa tantangan, kendala maupun peluang berdasarkan potensi, kewenangan serta kemampuan yang dimiliki.

Pelaksanaan Otonomi Daerah memberi peluang kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam rangka mengurus rumah tangganya termasuk didalamnya berupa implementasi otonomi daerah oleh Pemerintah Kecamatan.

Pada saat yang sama masyarakat pun diberikan peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsanya dalam rangka pembangunan daerah. Peranan masing-masing pihak ini pada akhirnya harus menjelma menjadi suatu kekuatan besar untuk mengelola daerah, khususnya dalam mengantisipasi dan mengatasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan perkembangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Salah satu konsekuensi logis dari posisi serta kondisi tersebut, maka Pemerintah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang harus mampu meningkatkan kualitas kinerja dalam memberikan pelayanan publik baik dalam kerangka perwujudan kesejahteraan masyarakat maupun strategi untuk menghadapi era persaingan global. Kinerja pelayanan yang baik pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong dan pendukung terhadap pertumbuhan serta perkembangan wilayah dan kota

### **3 Tujuan dan Sasaran**

#### **a. Tujuan**

Tujuan strategis Kecamatan Mentawa Baru Ketapang merupakan penjabaran yang akan dicapai sebagai wujud dari misi guna mewujudkan visi yang mengacu pada tujuan pembangunan nasional yang mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materil dan spritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Adapun tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tahun 2016 – 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan public dengan indikator
  - Indeks Kepuasan Masyarakat.
- b. Meningkatkan penguatan pemerintahan desa/kelurahan dengan indikator
  - Prosentse desa/kelurahan yang tertib administrasi
- c. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban lingkungan dengan indikator
  - Tertanganinya pelanggaran trantibmas
- d. Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan dengan indikator
  - Nilai AKIP

#### **b . Sasaran**

sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun mendatang Sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dalam priode pembangunan 2016 – 2021 sebagai berikut

- a. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dengan indikator sasaran antara lain:
  - Rata – rata Indeks Kepuasan Masyarakat.
  - Prosentase usulan yang tertampung dalam hasil musrenbang RKPD dikecamatan
- b Meningkatkan kualitas pemerintahan desa / kelurahan dengan indikator sasaran antara lain :
  - Prosentase desa/kelurahan yang telah selesai tata batas
  - Prosentase desa/kelurahan yang tertib administarsi
  - Prosentase lembaga perekonomian milik desa/kelurahan.

- Jumlah PKK desa/kelurahan aktif
- c. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan dengan indikator sasaran antara lain :
- Prosentase pelanggaran trantibmas  
yang ditangani.
  - Jumlah petugas linmas  
dikecamatan/kelurahan/desa
- d. Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan dengan indikator dengan indikator sasaran antara lain :
- Nilai AKIP Kecamatan
  - Prosentase temuan BPK dan Insfektorat yang ditindak lanjuti

Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sebagai implementasi dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur di bidang Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya, hal ini dapat diwujudkan apabila penyusunan perencanaan strategis dilakukan secara efektif dan efisien. Perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategis maka langkah yang harus dilakukan adalah mengimplementasikannya dalam bentuk program dan kegiatan yang ditetapkan dalam mendukung pencapaian tujuan sasaan dan strategis Kecamatan Mentawa Baru Ketapang antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - 1.1. Penyediaan jasa surat menyurat
  - 1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - 1.3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  - 1.4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - 1.5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - 1.6. Penyediaan alat tulis kantor
  - 1.7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - 1.8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - 1.9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - 1.10. Penyediaan makanan dan minuman
  - 1.11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  - 1.12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - 2.1. Pembangunan gedung kantor
  - 2.2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
  - 2.3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - 2.4. Pengadaan peralatan gedung kantor
  - 2.5. Pengadaan Mebeleur
  - 2.6. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
  - 2.7. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
  - 2.8. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
  - 2.9. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  - 3.1. Pengadaan mesin / kartu absensi
  - 3.2. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

- 3.3. Pengadaan pakaian KORPRI
  - 3.4. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
  4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
    - 4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
    - 4.2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
    - 4.3. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
  5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
    - 5.1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
  6. Program Penataan Administrasi dan Kependudukan
    - 6.1. Pembentukan dan Penataan sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK
  7. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
    - 7.1. Fasilitasi percepatan penyelesaian Tapal batas wilayah Administrasi antar daerah
    - 7.2. Pelaksanaan kegiatan Keagamaan, Kemasyarakatan dan hari-hari Besar Nasional/Daerah
    - 7.3. Penyediaan Barang dan Jasa Kelurahan Kelurahan Ketapang
    - 7.4. Penyediaan Barang dan Jasa Kelurahan MB. Hilir
    - 7.5. Penyediaan Barang dan Jasa Kelurahan MB. Hulu
    - 7.6. Penyediaan Barang dan Jasa Kelurahan Sawahan
    - 7.7. P Penyediaan Barang dan Jasa Kelurahan Pasir Putih
  8. Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah
    - 8.1. Pelaksanaan Sampit Expo
  9. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
    - 9.1. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
    - 9.2. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Peraturan Anggaran Desa
    - 9.3. Sosialisasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa
  10. Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa
    - 10.1. Evaluasi pengembangan desa dan kelurahan
  11. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
    - 11.1. Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan / Kelurahan / Desa
  12. Program Pengendalian Kebakaran Hutan
    - 12.1. Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan
  13. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
    - 13.1. Pengendalian Keamanan Lingkungan
  14. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
    - 14.1. Pembinaan pengurus RT/RW se-Kecamatan
- Untuk mewujudkan 14 (empat belas) program yang telah ditetapkan perlu didukung oleh 46 kegiatan yang sinergi dan akan direalisasikan pada tahun anggaran 2019

### **C. ISU – ISU STRATEGIS**

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang selama 5 (lima) tahun yang lalu, memecermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sesuai agenda dan prioritas pembangunan diantaranya Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan terpercaya, maka beberapa permasalahan

berdasarkan tugas pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Mentawa Baru Ketapang antara lain :

- a. Belum optimalnya pelaksanaan ketertiban administrasi Kecamatan dan Kelurahan.
- b. Belum optimalnya ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan.
- c. Belum optimalnya Realisasi program dan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik hasil musrebang Kecamatan.
- d. Belum optimalnya tingkat partisipasi Lembaga Masyarakat tingkat Kecamatan
- e. Belum optimalnya perencanaan Strategis tingkat SKPD
- f. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah
- g. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah
- h. Belum optimanya SDM aparatur pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan.
- i. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan program dan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten.

Beberapa permasalahan yang memerlukan pemecahan masalah melalui kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif yaitu :

- a. Pembinaan aparatur/pegawai yang ada dikecamatan, termasuk juga aparatur dikelurahan dan desa.
- b. Meningkatkan peran serta swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah
- c. Pembinaan perlindungan masyarakat dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan ketertiban umum.
- d. Meningkatkan fasilitas dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan kecamatan, kelurahan dan desa
- e. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi program – program kesejahteraan sosial dari pemerintah.
- f. Meningkatkan pelayanan ketata usahaan kecamatan, kelurahan dan desa

#### **D. DASAR HUKUM**

Laporan Kinerja Insatansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Mentawa Baru ketapang disusun berdasarkan beberapa landasan hokum sebagai berikut :

- a. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- b. Undang – undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- c. Inpres RI No. 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara
- d. Inpres RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah
- e. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Timur

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 188);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 180);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur No. 01 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2006-2010;

## **E. MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Tahun 2019 adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Tahun 2019 adalah untuk menggambarkan telah dilaksanakannya Program kinerja dan anggaran Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019, sebagai penjabaran hasil program kerja setiap satuan kerja, sehubungan hal tersebut maka wajib bagi Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Menyampaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Tahun 2019

## **F. SISTIMATIKA PENYAJIAN**

LKIP Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tahun 2019 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2019. Capaian kinerja 2019 diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja (TAPKIN) 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Tapkin sendiri merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016 – 2020.

Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2019 memungkinkan dilakukan indentifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Baupaten Kotawaringin Timur.

### **Bab I      Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisai.

### **Bab II     Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan penyajiaan kinerja tahun yang bersangkutan

### **Bab III    Akuntabilitas Kinerja**

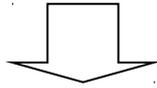
Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan dilakukan analisa capaian kinerja.

#### Bab IV Penutup

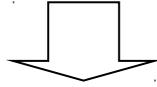
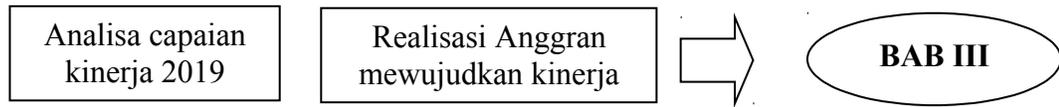
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja atau dapat di ilustrasikan dalam gambar sebagai berikut :

### SISTEMATIKA PENYAJIAN LKIP TAHUN 2019

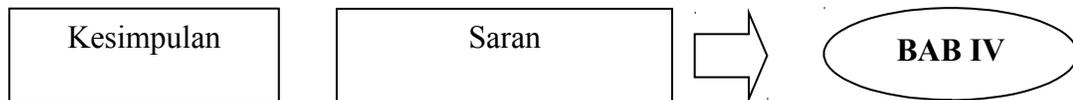




## AKUNTABILITAS KINERJA



## PENUTUP



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mentawa Baru Ketapag tahun 2019, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Beroksi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Sehubungan dengan peralihan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2011 -2015 ke rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016 – 2021 baru ditanda tangani pada bulan Nopember 2016. Sedangkan perubahan nomenklatur SOPD/PD ditanda tangani pada bulan Desember 2016 (Perda Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukandan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ). Disamping adanya saran dari evaluator LKIP Kementerian Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016 - 2021 dan Renstar SOPD agar direvisi/sesuaikan kembali dampak dari penyesuaian maka indikator

kinerja utama (IKU) Kabuapten Kotawaringin Timur dan IKU Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan

Setelah dibahas dan konsultasi dengan fasilitator Kemenpan dan RB mulai dari Januari 2019 sampai pada bulan Desember 2019 IKU Kabuapten Kotawaringin Timur dan IKU SOPD ditetapkan dan ditanda tangani Bupati Kotawaringin Timur. Perjanjian Kinerja (PK) SOPD diKabupaten Kotawaringin Timur ditetapkan dan ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2019.

Dengan ditetapkannya Perjanjian kinerja (PK) SOPD diKabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 2 Januari 2019 maka terjadi perubahan terhadap semua dokumen perencanaan kinerja dikecamatan Mentawa Baru Ketapang, pada indikator kinerja utama dan rencana kerja tahun 2019 dan perjanjian kinerja dikecamatan Mentawa Baru Ketapang untuk Csmst/Kepala SOPD. Dan pejabat eselon III (Sekcam) dan serta pejabat eselon IV juga ditetapkan perjanjian kinerja.

Adapun indikator kinerja utama kecamatan Mentawa Baru Ketapang, rencana kinerja tahunan tahun 2019, dan perjanjian kinerja tahun 2019 sebagai berikut :

#### **A. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik diindonesia diterbitkanya Permendagri Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan instansi pemerintah, Indikator Kinerja Utana merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah adapun indikator kinerja utama kecamatan Mentawa Baru Ketapang sebagaimana pada tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Utama tahun 2019**

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
1.	Rata – rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil survey kepuasan Masyarakat (Permenpan 16 tahun 2014 dan SK Menpan No. 25 tahun 2014
2.	Prosentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD diKecamatan	Jumlah usulan hasil Musrenbang kelurahan/desa yang tertampung pada musrenbang RKPD dikecamatan dibandingkan jumlah usulan dari hasil musrenbang kelurahan/desa yang disamapaikan kecamatan dikali 100 %

3.	Prosentase desa/kelurahan yang telah selesai tata batas	Jumlah desa/kelurahan yang telah selesai tata batas kecamatan dibandingkan Jumlah desa/kelurahan yang ada dikecamatan dikalikan 100 %
4.	Prosentase desa/kelurahan yang telah tertib administrasi	Jumlah desa/kelurahan yang evaluasi dibandingkan Jumlah desa/kelurahan yang ada dikecamatan dikalikan 100 %
5.	Prosentase lembaga perekonomian desa/kelurahan	Jumlah BUMDes yang ada dikecamatan dibandingkan Jumlah desa/kelurahan yang ada dikecamatan dikalikan 100 %
6.	Jumlah PKK Desa/Kelurahan aktif	Data Jumlah PKK Desa / Kelurahan aktif
7.	Prosentase pelanggaran Tranbmas yang ditangani	Jumlah pelanggar keamanan dan ketertiban yang ditangani di bandingkan Jumlah pelanggar keamanan dan ketertiban yang terjadi dimasyarakat dikalikan 100 %
8	Jumlah petugas linmas di Kecamatan/Kelurahan / Desa	Jumlah petugas linmas kecamatan.kelurahan desa yang dilatih/dibina.
9.	Nilai AKIP Kecamatan	Laporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) kecamatan oleh Insfektorat
10.	Prosentase temuan BPK / Insfektorat yang ditindak lanjuti	Temuan BPK/Insfektorat yang sudah ditindak lanjuti dibandingkan Jumlah BPK/Insfektorat Kecamatan dikalikan 100 %

## B. RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis Indikator Kinerja dan Target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabuapten Kotawaringin Timut 2016 -2021 Rencana Kinerja Tahun ini memuat berbagai indicator kinerja yang berfungsi sebagai baru meter atau ukuran yang dapat menunjukkan, menentukan, memberikan suatu ide atau memberikan dasar untuk mengambil kesimpulan. Selain itu indicator mengandung ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian asas suatu sasara. Indicator kinerja adalah petunjuk untuk memahami kinerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi atau SOPD, kemajuan yang diperoleh dalam mencapai tujuan dan sasaran startejik yang telah ditetapkan indicator kinerja dapat menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah digunakan organisasi atau SOPD. Indicator kinerja adalah ukuran keuangan dan non keuangan dari berbagai aspek yang berbeda dari suatu organisasi atau SOPD. Indicator kinerja merupakan ukuran atas prilaku yang kritis bagi organisasi atau SOPD namun tidak dapat memecahkan masalah. Secara kongkrit indicator kinerja tersebut dapat dilihat pada Rencana KInerja Tahunan (RKT) Kecamatan Mentawa Baru Ketapang lampiran 2 atau secara ringkas dapat dilihat pada tabel 2.2 sabagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Rencana Kinerja Tahunan 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS		TARGET KINERJA
1	2	3		5
1	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima	1	Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik
		2	Prosentase usulan yang tertampung dlm hasil Musrenbang (RKPD) di Kecamatan	100%
2	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	1	Prosentase desa/kelurahan yang telah selesai tata batas	85%
		2	Prosentase desa / kelurahan yang tertib administrasi	100%
		3	Prosentase lembaga perekonomian milik desa	100%
		4	Jumlah PPK desa / kelurahan aktif	Desa / kelurahan
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan	1	Prosentase pelanggaran trantibmas yang ditangani	100%
		2	Jumlah petugas Linmas kecamatan, kelurahan dan desa	100 org
4	Meningkatnya Akuntabelitas Kinerja Kecamatan	1	Nilai AKIP Kecamatan	70
		2	Prosentase temuan BPK/Isfektorat yang ditindak lanjuti	100%

### C. PERJANJIAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja, hendaknya memperhatikan Kontrak kinerja, dokumen perencanaan jangka menengah, dokumen perencanaan tahunan, dokumen penganggaran dan atau pelaksanaan kinerja, dokumen penetapan kinerja dimanfaatkan oleh setiap instansi atau Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) untuk :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi ;
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan kinerja instansi pemerintah ;

### 3. Menilai keberhasilan organisasi.

Pada setiap akhir tahun periode, instansi atau SOPD melakukan pengukuran pencapaian arget kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja biasanya dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Hasil pengukuran kinerja dilaporkan oleh instansi atau SOPD dalam Laporan Kinerja atau biasa disebut LKIP.

LKIP instansi atau SOPD ini disampaikan kepada LKIP dimanfaatkan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2019 adalah Perjanjian Kinerja Kecamatan Mentawa Baru Ketapang 2019 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Rensfra) 2016 - 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2019. Perjanjian Kinerja meliputi 4 (empat) sasaran sfrategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima
2. Meningkatnya kualitas pemerintahan desa
3. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan
4. Meningkatnya akuntaslitas kinerja kecamatan

Perjanjian Kinerja Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tahun 2019 secara garis besar dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.3  
Penetapan Kinerja tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	1 Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 Pelayanan Administarasi Perkantoran	Baik	9,522,328,055
			2 Peningkatan sarana dan prasarana		
			3 Peningkatan disiplin aparatur		
			4 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		
			5 Penataan administrasi kependudukan sistem koneksi (NIK)		
			6 Penataan daerah otonomi baru		
		2 Prosentase usulan yang tertampung dlm hasil Musrenbang (RKPD) di Kecamatan	1 Perencanaan pembangunan daerah	100%	26,690,000
2	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	1 Prosentase desa/keluarahan yang telah selesai tata batas	1 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wiliayah administrasi antar daerah	85%	114,900,000
		2 Prosentase desa /	1 Peningkatan	100%	102,270,000

			kelurahan yang tertib administrasi	partisipasi masyarakat dlm membangun desa		
				2 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		
		3	Prosentase lembaga perekonomian milik desa	1 Peningkatan promosi dan investasi daerah	100%	15,074,020
		4	Jumlah PPK desa / kelurahan aktif	1 Peningkatan peran perempuan di pedesaan	12 PKK	111,900,000
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan	1	Prosentase pelanggaran trantibmas yang ditangani	1 Pengendalian kebakaran hutan dan lahan	100%	15,622,500
				2 Penyelesai konflik - konflik pertanahan		
				3 Pemberdayaan masyarakat unruk menjaga ketertiban dan keamanan		
		2	Jumlah petugas Linmas kecamatan, kelurahan dan desa	1 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 org	153,472,500
4	Meningkatnya Akuntabelitas Kinerja Kecamatan	1	Nilai AKIP Kecamatan	1 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	55 %	29,138,100
		2	Prosentase temuan BPK/Isfektorat yang ditindak lanjuti		100%	0
				Capaian Kinerja / Realisasi Anggaran		<b>10,091,395,175</b>

Guna melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Kecamatan Mentawa Baru Ketapang di tahun 2019 dengan anggaran belanja sebesar **Rp 14.664.728.425** (Empat Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) termasuk belanja tidak langsung Rp **4.688.233.250** (Empat Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dan belanja langsung **Rp 9.976.495.175** (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). Belanja langsung **Rp 9.976.495.175** (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) Kecamatan Mentawa Baru Ketapang program dan kegiatan dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran tahun 2019 perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien

Perjanjian Kinerja Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tahun 2019 Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Pengukuran Kinerja (PK) secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1.2.3 dan 4.

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan LKIP serta Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran.

LKIP 2019 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019. Terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja

tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan sesuai Keputusan Kepala LAN Nomor. 239/IX/618/2008 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Permendagri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah. Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing – masing sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara menyimpulkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata – rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya Kecamatan Mentawa Baru Ketapang menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja empat kategori sebagai berikut :

**Tabel 3. 1**  
**Kategori Pencapaian Kinerja**

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 100 %	Sangat Berhasil
II	91 % sampai 100%	Berhasil
III	81 % sampai 90 %	Cukup Berhasil
IV	Kurang dari 81 %	Kurang berhasil

Secara umum Kecamatan Mentawa baru Ketapang telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Mentawa baru Ketapang tahun 2016 – 2021 sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja tahun 2019.

Dalam Renstra dan penetapan kinerja terdapat 4 misi Kabupaten Kotawaringin Timur yang dilaksanakan Kecamatan Mentawa baru Ketapang memiliki 4 sasaran dan 10 indikator yang harus dilaksanakan.

Dari sasaran 4 dan 10 indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tingkat capaian realisasi indikator kinerja sasaran Kecamatan Mentawa Baru Ketapang adalah **“Sangat Berhasil “ dengan Nilai 100 %**

## B. ANALISA CAPAIAN KINERJA ECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai dapat dengan membandingkan dengan target dan realisasi pada indiaktor sasaran. Hasil pengukuran dan pencapaian kinerja sasaran kecamatan Mentawa Baru Ketapang tahun 2019 dapat dilihat pada lampiran :

Adapun pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 4 sasaran dan 10 indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Mentawa Baru ketapang tahun 2016 –

2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci sebagai berikut :

**Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima**

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “**Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima**” diukur melalui 2 indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut sebagaimana pada disajikan pada tabel 3.2 dengan perbandingan target akhir Rensatar tahun 2021 berikut :

**Tabel 3.2**  
**Analisis Sasaran I Tahun 2019**

No	IndikatorKinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian (%)	Tahun 2019	Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rata – rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik	Baik	100	Baik	100
2	Prosentase usulan yang tertampung dlm hasil Musrenbang (RKPD) di Kecamatan	%	100	100	100	100	100
<b>Rata –rata capaian kinerja</b>					<b>100</b>		<b>100</b>

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kkerja sasaran ” **Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima**” diukur melalaui 2 sasaran indicator yaitu Indeks kepuasan masyarakat dan prosentase usulan yang tertampung dalam hasil RKPD kecamatan berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja adalah sebesar 100 % yang berarti termasuk dalam kategori capaian Berhasil atau mencapapai target walau pun indicator Indek Kepuasan Masyarakat belum lakukan survey atau penilaian

Perbandingan realiasasi kinerja tahun 2018 dan tahun 2019 disajikan tabel 3.3 sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran I**

No	IndikatorKinerja	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	6	8
1	Rata – rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Belum dilakukan survey/penilaian	Belum dilakukan survey/penilaian
2	Prosentase usulan yang tertampung dlm hasil Musrenbang (RKPD) di Kecamatan	%	100	100

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayaguna aparatur Negara Nomor. KEP/25/M.PAN/2/2004 capaian indicator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 80,89 % pada persepsi penilaian IKM sebagai berikut :

- A. ( Sangat Baik) : 81,26 – 100,00
- B. (Baik) : 62,52 – 81.26

C. (Kurang Baik) : 43,76 – 62,52

D. (Tidak Baik) : 25.00 – 43,76

Berdasarkan target yang harus dicapai Kecamatan Mentawa Baru Ketapang pada indicator kinerja Prosentase usulan yang tertampung dlm hasil Musrenbang (RKPD) di Kecamatan dengan capaian 100 % dan sedangkan pada indicator Indeks Kepuasan Masyarakat ditahun 2018 dan 2019 belum dilakukan survey atau penilaian, pada tahun 2019 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilingkungan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang akan dilakukan survey atau penilaian sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayaguna aparatur Negara Nomor. KEP/25/M.PAN/2/2004.

Dalam meningkatkan capaian indicator kinerja indeks pelayan/ indeks kepuasan masyarakat berdasarkan pementau/evaluasi dan analisis, untuk tahun akan datang direkomendasikan / solusi / rencana aksi pada tahun berikutnya :

- a. Melakukan pembinaan seluruh aparatur kecamatan. Kelurahan dan desa dilingkungan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tentang memberikan peyanan publik yang prima
- b. Perlu melakukan studi pembelajaran keinstansi lain/kedaerah lain atau memberangkatkan petugas pelayanan untuk mengikuti pelatihan/Bimtek.

Faktor yang sangat mempengaruhi dan mendukung tercapainya indikator indeks kepuasan masyarakat yaitu program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut ;

Tabel 3.4  
Program/kegiatan penunjang pencapaian indikator kinerja  
Rata – rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  
tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Kinerja				Anggaran (Rp)	Keuangan	
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)		Realisasi	Capaian (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan administrasi kantor yangtersedia dalam setahun sesuai dengan kebutuhan	Prosentase	90%	97.43%	100	1,162,518,410	1,138,614,879	100
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dilayani dalam setahun	lembar	950	950	100	6,000,000	6,000,000	100
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bidang/bagian/seksi yang dilayani dalam setahun	bidang	228	228	92.67	65,040,000	63,524,734	92.67
	3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	laporan	48	48	94.02	361,793,110	340,165,062	94.02
	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan	m2	475	470	100	14,877,500	14,877,500	100
	5 Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bidang/bagian/seksi yang terpenuhi ATK	Seksi / kasub	1166	1166	99,49	48,820,300	48,819,900	100

	6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	lembar	1677	1667	99,94	60,220,000	60,217,850	100
	7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen yang disediakan	buah	33	32	98,85	8,232,500	8,225,000	99,91
	8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	exemplar	5425	5400	96,84	25,000,000	24,960,000	99,84
	9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah peserta rapat yang dilayani makan dan minum	orang /kali	18600	18400	99,98	207,535,000	207,210,000	99,84
	10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi didalam daerah yang dihadiri	kali	17	17	99,98	210,000,000	209,664,833	99,84
	11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi keluar daerah yang dihadiri	kali	16	16	99,97	155,000,000	154,950,000	99,97
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana yang memadai	Prosentase	70%	70%	99,36	3,202,732,440	3,166,745,316	98,88
	1	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dibangun	unit	4	4	96,87	211,700,000	208,990,000	98,72
	2	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung yang dibangun	paket	8	8	99,64	2,070,450,000	2,044,490,000	98,75
	3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan yang dibeli	unit	17	17	96,43	222,849,020	221,314,443	99,31
	4	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang dibeli	unit	1	1	89,06	266,262,220	262,739,925	98,68
	5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	unit	20	20	96,69	74,620,000	73,884,848	99,01
	6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	unit	19	19	100	9,115,200	9,110,000	99,94
	7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang dipelihara	unit	30	30	99,69	8,336,000	8,315,000	99,75
	8	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	unit	1	1	100	339,400,000	337,901,100	99,56
3		Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah pelanggaran disiplin aparatur	Prosentase	75	75	100	49,000,000	48,600,000	99,14
	1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu yang dibeli	stel	2	2	100	49,000,000	48,600,000	99,14
4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang meningkat kapasitas/ pengetahuannya	Prosentase	75%	75%	99,83	117,482,400	116,559,166	99,21
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang dikirimkan diklat / bintek	orang / kali	12	11	99,83	117,482,400	116,559,166	99,21
5		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase jumlah penduduk yang telah melakukan rekam e - KTP	Prosentase	75%	80%	100	162,423,650	159,739,330	98,35
	1	Pembentukan dan Penataan	Jumlah personil yang melakukan	orang	5	5	100	162,423,650	159,739,330	98,35

	Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK	rekaman e - KTP							
6	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Prosentase pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kemasayarakatan dikecamatan	Prosentase	95%	95%	98,65	4,828,171,155	4,639,064,788	96.08
1	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	Jumlah desa/ kelurahan yang telah menyelesaikan tapal batas	desa/ kelurahan	11	11	99,26	114,900,000	114,400,000	99.56
2	Pelaksanaan Kegiatan Kegamaan, Kemasayarakatan dan Hari-hari Besar Nasional/Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintah dan kemasayarakatan yang diikuti	kegiatan	11	11	99,26	288,745,000	271,470,000	94.02
3	Penyediaan Barang dan Jasa Kelurahan Mentawa Baru Hulu	Jumlah barang dan jasa yang disediakan	Belanja	22	22	100	432,785,895	427,394,876	98.75
4	Penyediaan Barang dan Jasa Kelurahan Mentawa Baru Hilir	Jumlah barang dan jasa yang disediakan	Belanja	19	19	100	498,231,515	485,117,130	97.37
5	Penyediaan Barang dan Jasa Kelurahan Ketapang	Jumlah barang dan jasa yang disediakan	Belanja	19	19	100	447,981,515	437,279,889	97.61
6	Penyediaan Barang dan Jasa Kelurahan Sawahan	Jumlah barang dan jasa yang disediakan	Belanja	16	16	100	335,735,895	327,112,939	97.43
7	Penyediaan Barang dan Jasa Kelurahan Pasir Putih	Jumlah barang dan jasa yang disediakan	Belanja	15	15	100	289,791,335	282,188,073	97.38

Sedangkan faktor yang sangat mempengaruhi tercapainya indikator usulan masyarakat yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan 100 % yang didukung oleh program dan kegiatan dari target yang direncanakan 100 % dalam perjanjian kinerja 2019 prosentase capaian kinerjanya 100 % tercapai yang telah ditargetkan, tercapainya indikator Rata – rata indeks kepuasan masyarakat dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Program/kegiatan penunjang pencapaian indikator kinerja**  
**Rata – rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**  
**tahun 2019**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Kinerja				Anggaran (Rp.)	Keuangan	
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)		Realisasi	Capaian (%)
1	Program perencanaan	Prosentase	Prosentase	75	75	100%	26,690,000	26,690,000	99.83

	pembangunan daerah	usulan yang tertampung dalam hasil musrenbang RKPD dikecamatan							
1	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah usulan masyarakat/orga nisasi yang hadir dalam kegiatan musrenbang RKPD dikecamatan	Peserta	300	300	100%	26,690,000	26,690,000	99.83

## Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pemerintahan desa / kelurahan

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “**Meningkatnya kualitas pemerintahan desa**” diukur melalui 4 indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut sebagaimana pada disajikan pada tabel 3. 6 dengan perbandingan target akhir Renstra tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 3. 6**  
**Analisis Sasaran 2 tahun 2019**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian (%)	Tahun 2019 Target	Capaian (%)
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prosentase desa / kelurahan yang telah selesai tata batas	%	85	85	100	100	100
2	Prosentase Desa / kelurahan yang tertib administrasi	%	100	100	100	100	100
3.	Prosentase lembaga perekonomian milik desa	%	100	100	100	100	100
4	Jumlah PKK desa/ kelurahan aktif	kelompok	12	12	100	100	100
<b>Rata –rata capaian kinerja</b>					<b>100</b>		<b>100</b>

Sasaran meningkatnya kualitas pemerintahan desa / kelurahan diukur melalui 4 indikator yang diperjanjikan yaitu prosentase desa/kelurahan yang telah selesai tata batas. Prosentase desa/kelurahan yang tertib administrasi, Prosentase lembaga perekonomian milik desa dan jumlah PKK desa / kelurahan aktif.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran ” **Meningkatnya kualitas pemerintahan desa/kelurahan**” adalah sebesar 100.00 % yang berarti termasuk dalam kategori capaian “ **Berhasil** “

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dan tahun 2019 disajikan tabel 3.7 sebagai berikut :

**Tabel 3. 7**

**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	6	8
1	Prosentase desa / kelurahan yang telah selesai tata batas	Prosentase	85	90
2	Prosentase Desa / kelurahan yang tertib administrasi	Prosentase	100	100
3	Prosentase lembaga perekonomian milik desa	Prosentase	100	100
4	Jumlah PKK desa/ kelurahan aktif	Kelompok	12	12

Faktor yang sangat mempengaruhi dan mendukung tercapainya indikator Prosentase desa / kelurahan yang telah selesai tata batas yaitu program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 3. 8 sebagai berikut ;

**Tabel 3.8**

**Program/kegiatan penunjang pencapaian indikator kinerja Prosentase desa / kelurahan yang telah selesai tata batas tahun 2019**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Kinerja				Anggaran (Rp.)	Keuangan	
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)		Realisasi	Capaian (%)
1	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Prosentase pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan masyarakatan dikecamatan	Prosentase	95	95	100%	4,828,171,155	4,639,064,788	96.08
1	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	Jumlah desa/ kelurahan yang telah menyelesaikan tapal batas	desa/ kelurahan	11	11	100%	4,828,171,155	4,639,064,788	96.08

Pada capaian kinerja indikator **Prosentase Desa / kelurahan yang tertib administrasi** adalah sebesar 100 % dari yang ditargetkan yang telah direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2019, sehingga prosentase capaian kerjanya adalah 100 % mencapai target yang ditetapkan

Faktor yang sangat mempengaruhi dan mendukung tercapainya **Prosentase Desa / kelurahan yang tertib administrasi** yaitu program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.9 sebagai berikut ;

**Tabel 3. 9**

**Program/kegiatan penunjang pencapaian indikator kinerja  
Prosentase Desa / kelurahan yang tertib administrasi tahun 2019**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Kinerja				Anggaran (Rp.)	Keuangan	
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)		Realisasi	Capaian (%)
1	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Prosentase desa/ kelurahan yang tertib administarsi	Prosentase	85	85	100%	50,000,000	49,966,300	99.93
1	Evaluasi Pengembangan Desa dan Kelurahan	Jumlah desa / kelurahan yang dievaluasi	desa/ kelurahan	11	11	100%	50,000,000	49,966,300	99.93
2	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Prosentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang telah direview	Prosentase	75	75	100%	52,270,000	52,183,000	99.83
1	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	Jumlah rancangan tentang APBDes yang dievaluasi	desa	6	6	100%	52,270,000	52,183,000	99.83

Pada capaian kinerja indikator **Prosentase lembaga perekonomian milik desa** adalah sebesar 100 % dari yang ditargetkan yang telah direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2019, sehingga prosentase capaian kerjanya adalah 100 % mencapai target yang ditetapkan

Faktor yang sangat mempengaruhi dan mendukung tercapainya **Prosentase lembaga perekonomian milik desa** yaitu program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.10 sebagai berikut

**Tabel 3.10**

**Program/kegiatan penunjang pencapaian indikator kinerja  
Prosentase lembaga perekonomian milik desa tahun 2019**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Kinerja				Anggaran (Rp.)	Keuangan	
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)		Realisasi	Capaian (%)
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya produk unggulan dikecamatan yang dipromosikan	Kegiatan	1	1	100%	15.074.020	14,825,000	98.35
1	Pelaksanaan Sampit Expo	Jumlah kegiatan expo yang diikuti	Kegiatan	1	1	100%	15.074.020	14,825,000	98.35

Pada capaian kinerja indikator **Jumlah PKK desa/ kelurahan aktif** adalah sebesar 100 % dari yang ditargetkan yang telah direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2019, sehingga prosentase capaian kerjanya adalah 100 % mencapai target yang ditetapkan

Faktor yang sangat mempengaruhi dan mendukung tercapainya **Jumlah PKK desa/ kelurahan aktif** yaitu program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.11 sebagai berikut

**Tabel 3.11**

**Program/kegiatan penunjang pencapaian indikator kinerja  
Jumlah PKK desa/ kelurahan aktif tahun 2019**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Kinerja				Anggaran (Rp.)	Keuangan	
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)		Realisasi	Capaian (%)
1	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Prosentase peningkatan peran perempuan dalam pembangunan dikecamatan. Kelurahan dan desa	Prosentase	75	80	100	111,900,000	110,866,605	99.08
1	Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan/Kelurahan/Desa	Jumlah anggota / kelompok PKK yang dibina	Kelompok	12	12	100	111,900,000	110,866,605	99.08

**Sasaran 3 : Meningkatkan Ketentraman dan Keamanan Lingkungan**

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “**Meningkatnya ketentraman dan keamanan lingkungan**” diukur melalui **2 indikator**. Indikator kinerja sasaran tersebut sebagaimana pada disajikan pada tabel 3.12 dengan perbandingan target akhir Rensatar tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 3.12**

**Analisis Sasaran 3 tahun 2019**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian (%)	Tahun 2019 Target	Capaian (%)
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prosentase pelanggaran trantibmas yang ditangani	%	100	100	100	100	100
2	Jumlah petugas Linmas kecamatan, kelurahan dan desa	orang	100	100	100	100	100
Rata –rata capaian kinerja					100		100

Sasaran **Meningkatnya Ketentraman dan Keamanan Lingkungan** diukur melalui 2 indikator yang diperjanjikan yaitu Prosentase pelanggaran trantibmas yang ditangani. Jumlah petugas Linmas kecamatan, kelurahan dan desa,

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “**Meningkatnya Ketentraman dan Keamanan Lingkungan**” adalah sebesar 100.00 % yang berarti termasuk dalam kategori capaian “**Berhasil**”

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dan tahun 2019 disajikan tabel 3.13 sebagai berikut :

**Tabel 3.13**

**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	6	8
1	Prosentase pelanggaran trantibmas yang ditangani	Prosentase	100	100
2	Jumlah petugas Linmas kecamatan, kelurahan dan desa	orang	100	100

Pada capaian kinerja indikator **Meningkatnya Ketentraman dan Keamanan Lingkungan** adalah sebesar 100 % dari yang ditargetkan yang telah direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2019, sehingga prosentase capaian kinerjanya adalah 100 % mencapai target yang ditetapkan

Faktor yang sangat mempengaruhi dan mendukung tercapainya **Meningkatnya Ketentraman dan Keamanan Lingkungan** yaitu program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.14 sebagai berikut

**Tabel 3.14**

**Program/kegiatan penunjang pencapaian indikator kinerja  
Meningkatnya Ketentraman dan Keamanan Lingkungan tahun  
2019**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Kinerja				Anggaran (Rp.)	Keuangan	
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)		Realisasi	Capaian (%)
1	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Prosentase Peningkatan kantibmas	Prosentase	75	75	100%	153,472,500	153,109,000	99.76
	1 Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah pelanggaran kantibmas yang ditangani	orng	100	100	100%	153,472,500	153,109,000	99.76
2	Program pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Jumlah kasus kebakaran lahan dan hutan yang dapat ditangani	Prosentase	75	75	100%	15,622,500	15,600,000	99.86
	1 Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan	Jumlah peserta sosialisasi	orng	100	100	100%	15,622,500	15,600,000	99.86

**Sasaran 3 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “**Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan**” diukur melalui **2 indikator**. Indikator kinerja sasaran tersebut sebagaimana pada disajikan pada tabel 3.15 dengan perbandingan target akhir Rensatar tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 3.15**

**Analisis Sasaran 4 tahun 2019**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019	Capaian (%)	Tahun	Capaian (%)
-------------------	--------	------------	-------------	-------	-------------

No						2019	
			Target	Realisasi		Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	70	71.95	100	100	100
2	Prosentase temuan BPK / Insfektorat yang ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100
<b>Rata –rata capaian kinerja</b>					<b>100</b>		<b>100</b>

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dan tahun 2019 disajikan tabel 3.16 sebagai berikut :

**Tabel 3.16**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	6	8
1	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	65,67	71.95
2	Prosentase temuan BPK / Insfektorat yang ditindak lanjuti	Prosentase	100	100

Pencapaian kinerja indikator Nilai AKIP Kecamatan Mentawa Baru Ketapang adalah sebesar 71.95 dari yang target 70 yang direncanakan dalam perjanjian kinerja prosentase capaian kinerja adalah 99 % yang ditarget. Sedangkan hasil penilaian AKIP Kecamatan Mentawa Baru ketapang tahun 2018 terdiri dari 3 komponen penting dalam pengukuran AKIP yang dilakukan oleh Insfektorat Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan agar nilai evaluasi SAKIP pada tahun 2019 meningkat lebih baik diantaranya :

- a. Dokumen Renstra dalam membuat indikator kinerja tujuan yang memenuhi kriteria indikator yang baik.
- b. Target indikator agar ditetapkan dengan baik
- c. Dokumen Renstra dan IKU direviu secara berkala
- d. Mekanisme pengumpulan data kinerja harus sesuai validasinya

Sehubungan dengan hasil evaluasi insfektorat Kabupaten Kotawaringin Timur harus dilakukan upaya – upaya oleh Kecamatan Mentawa Baru Ketapang antara lain :

- a. Berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur dan juga Bagian Organisasi Sekretariat Daerah mereviu kembali Renstra dan IKU Kecamatan.
- b. Harus perbaikan SOP kecamatan yang terkait SOP Pengumpulan Data dan Penyusunan SAKIP.

Upaya dalam meningkatkan capaian indikator nilai AKIP Kecamatan Mentawa Baru Ketapang berdasarkan hasil evaluasi dan analisa, untuk yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut ;

- a. Mengikuti sertakan aparatur dilingkungan kecamatan dalam pembinaan dan pengembangan perencanaan serta pelaporan AKIP.
- b. Melakukan revidi terhadap dokumen renstra dan IKU kecamatan Mentawa Baru ketapang

Sedangkan pada sasaran 4 ini capaian indikator Nilai AKIP kecamatan Mentawa Baru Ketapang tidak didukung oleh program dan kegiatan / tidak terakomodir dalam renja tahunan

Untuk mengetahui program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator Nilai AKIP dapat dilihat pada tabel 3.17 sebagai berikut ;

**Tabel 3.17**

**Program/kegiatan penunjang pencapaian indikator kinerja Nilai AKIP Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tahun 2019**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Kinerja				Anggaran (Rp.)	Keuangan	
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)		Realisasi	Capaian (%)
1	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Jumlah laporan yang sesuai standar	laporan	3	3	100%	-	-	-
	1 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SOPD	Jumlah laporan capai kinerja dan ikhtisar dan realisasi kinerja SOPD yang disusun	laporan	2	2	100%	-	-	-
	2 Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	laporan	1	1	100%	-	-	-

Pencapaian kinerja indikator prosentase temuan BPK / infektorat yang sudah ditindak lanjuti adalah sebesar 100 % dari target 100 % yang direncanakan dalam penetapan kinerja tahun 2019 hingga prosentase capaian indikator kinerja 100 % mencapai target.

Keberhasilan pencapain indikator kinerja prosentse temuan BPK / Insfektorat yang ditindak lanjuti disebabkan Faktor antara lain:

- a. Kesiapan SDM dalam menindak lanjuti temuaan
- b. Adanya reward dari pimpinan

Faktor pengahambat antara lain :

- a. Minimnya SDM atas pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang
- b. Terbatasnya jumlah SDM dalam job description pada sub keuangan

Untuk mempertahankan capaian prosentase temuan BPK / Insfektorat yang ditindak lanjuti dari hasil evaluasi dan analisa yang akan datang nanti perlu solusi dan perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan pembinaan terhadap pegawai dilingkungan Kecamatan dengan mengikut sertakan Diklat dan Bimtek.
- b. Meupayakan pembinaan internal secara berkala

### C. REALISASI ANGGARAN

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Kecamatan Mentawa Baru Ketapang di tahun 2019 dengan anggaran belanja sebesar **Rp 14.664.728.425** (Empat Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) termasuk belanja tidak langsung Rp **4.688.233.250** (Empat Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dan belanja langsung **Rp 9.976.495.175** (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). Belanja langsung **Rp 9.976.495.175** (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) Kecamatan Mentawa Baru Ketapang program dan kegiatan dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran tahun 2019 perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien

Data Anggaran dan Realisasi DPA – SOPD Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tahun 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dalam rangka mencapai target kinerja adalah tersaji pada tabel 3.18 sebagai berikut :

**tabel 3.18**  
**Realisasi Anggaran Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tahun 2019**

Kode Rekening				Dinas/Program/Kegiatan/Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	(%)
				<b>PENDAPATAN</b>			
				<b>1. PENDAPATAN DAERAH</b>			
				1) Pajak Daerah			
				2) Retribusi Daerah	-	-	-
				3) Bagian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang terpisah	-	-	-
				4) Lain - lain PAD sah	-	-	-
				<b>BELANJA</b>	<b>14,664,728,425</b>	<b>14,102,438,674</b>	<b>96,17</b>
				<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>			
5	1				<b>4,688,233,250</b>	<b>4,382,266,890</b>	<b>93,47</b>
5	1	1	01	Gaji Dan Tunjangan	4,688,233,250	4,382,266,890	93,47
				<b>BELANJA LANGSUNG</b>			
5	2				<b>9,976,495,175</b>	<b>9,720,171,784</b>	<b>97,43</b>
5	2	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,162,518,410	1,138,614,879	97.94
5	2	0	1	0 Penyediaan jasa surat menyurat	6,000,000	6,000,000	100.00
5	2	0	1	0 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	65,040,000	63,524,732	97.67
5	2	0	1	0 Penyediaan jasa administrasi keuangan	361,793,110	340,165,062	94.02
		0	0	0 Penyediaan jasa kebersihan kantor	14,877,500	14,877,500	100.00

5	2	1	8				
5	2	0	1	Penyediaan alat tulis kantor	48,820,300	48,819,900	100.00
		1	0				
5	2	0	1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60.220.000	60,217,850	100.00
		1	1				
5	2	0	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8,232,500	8,225,000	99.91
		1	2				
5	2	0	1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	25,000,000	24,960,000	99.84
		1	5				
5	2	0	1	Penyediaan makanan dan minuman	207,535,000	207,210,000	99.84
		1	7				
5	2	0	1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	210,000,000	209,664,833	99.84
		1	8				
5	2	0	1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	155,000,000	154,950,000	99.97
		1	9				
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>3,202,732,440</b>	<b>3,166,745,316</b>	<b>98.88</b>
		<b>2</b>					
5	2	0	0	Pembangunan rumah dinas	211,700,000	208,990,000	98.72
		2	2				
5	2	0	0	Pembangunan gedung kantor	2,070,450,000	2,044,490,000	98.75
		2	3				
5	2	0	0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	222,849,020	221,314,843	99.31
		2	7				
5	2	0	0	Pengadaan peralatan gedung kantor	266,262,260	262,779,925	97.50
		2	9				
5	2	0	2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	74,620,000	73,884,848	99.01
		2	4				
5	2	0	2	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	9,115,200	9,110,000	99.94
		2	6				
5	2	0	2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8,336,000	8,315,000	99.75
		2	8				
5	2	0	4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	339,400,000	337,901,100	99.56
		2	2				
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>49,000,000</b>	<b>48,600,000</b>	<b>99.18</b>
		<b>3</b>					
5	2	0	0	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	49,000,000	48,600,000	99.18
		3	5				
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>117,482,400</b>	<b>116,559,166</b>	<b>99.21</b>
		<b>5</b>					
5	2	0	0	Pendidikan dan pelatihan formal	117,482,400	116,559,166	99.21
		5	1				
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>162,423,650</b>	<b>159,739,330</b>	<b>98.35</b>
		<b>5</b>					
5	2	1	0	Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK	162,423,650	159,739,330	98.35
		5	4				
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>153,472,500</b>	<b>153,109,000</b>	<b>99.76</b>
		<b>5</b>					
5	2	1	0	Pengendalian keamanan lingkungan	153,472,500	153,109,000	99.76
		5	5				
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>15,074,020</b>	<b>14,825,000</b>	<b>98.35</b>
		<b>5</b>					
5	2	1	1	Pelaksanaan Sampit Expo	15,074,020	14,825,000	98.35
		5	2				
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>	<b>4,828,171,155</b>	<b>4,639,064,788</b>	<b>96.08</b>
		<b>6</b>					
5	2	1	0	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	114,900,000	114,400,000	99.56
		6	1				
5	2	1	0	Pelaksanaan Kegiatan Kegamaan, Kemasyarakatan dan Hari-hari Besar Nasional/Daerah	288,745,000	271,470,000	94.02
		6	3				
		1	0	Penyediaan Barang dan Jasa Kelurahan Mentawa Baru Hulu	432,785,895	427,394,876	98.75
		6	4				

5	2							
5	2	1	0	Penyediaan Barang dan Jasa Kelurahan Mentawa Baru Hilir	498,231,515	485,117,130	97.37	
5	2	1	0	Penyediaan Barang dan Jasa Kelurahan Ketapang	447,981,515	437,279,889	97.61	
5	2	1	0	Penyediaan Barang dan Jasa Kelurahan Sawahan	335,735,895	327,112,939	97.43	
5	2	1	0	Penyediaan Barang dan Jasa Kelurahan Pasir Putih	289,791,335	282,188,073	97.38	
5	2	1		<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	<b>50,000,000</b>	<b>49,966,300</b>	<b>99.93</b>	
5	2	1	1	Evaluasi Pengembangan Desa dan Kelurahan	50,000,000	49,966,300	99.93	
5	2	1		<b>Program peningkatan peran perempuan di perdesaan</b>	<b>111,900,000</b>	<b>110,866,605</b>	<b>99.08</b>	
5	2	1	0	Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan/Kelurahan/Desa	111,900,000	110,866,605	99.08	
5	2	2		<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>26,690,000</b>	<b>25,200,000</b>	<b>94.42</b>	
5	2	2	0	Penyelenggaraan musrenbang RKP	26,690,000	25,200,000	94.42	
5	2			<b>Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa</b>	<b>52,270,000</b>	<b>52,183,000</b>	<b>99.83</b>	
5	2	2	0	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	52,270,000	52,183,000	99.83	
5	2	2		<b>Program pengendalian kebakaran hutan dan lahan</b>	<b>15,622,500</b>	<b>15,600,000</b>	<b>99.86</b>	
5	2	2	0	Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan	15,622,500	15,600,000	99.86	
<b>Capaian Kinerja Keuangan</b>								<b>96,17</b>

Dari data diatas menunjukkan bahwa APBD Kecamatan Maentawa Baru Ketapang Tahun 2019 **Rp 14.664.728.425** (Empat Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp 14,102,438,674** (Empat Belas Milyar Seratus Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) capaian kinerja keuanga sebesar 96.17%, yang terdiri dari 7 (tujuh) program dan 29 (dua puluh Sembilan) kegiatan.

adapun rincian pagu anggaran dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian kinerja, tujuan dan sasaran sesuai dengan renstra Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel 3. 19 sebagai berikut:

**Tabel 3.19**  
**Realisasi Capaian Target Capaian Kinerja 4 Sasaran Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Tahun 2019**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI			
					TARGET	%	ANGGARAN (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	1 Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	9,522,328,055	Baik	100%	9,269,232,479	97.34

		2	Prosentase usulan yang tertampung dlm hasil Musrenbang (RKPD) di Kecamatan	100%	26,690,000	100%	100%	25,200,000	94.42
2	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	1	Prosentase desa/kelurahan yang telah selesai tata batas	85%	114,900,000	85%	100%	114,400,000	99.56
		2	Prosentase desa / kelurahan yang tertib administrasi	100%	102,270,000	100%	100%	102,149,300	95.95
		3	Prosentase lembaga perekonomian milik desa	100%	15,074,020	100%	100%	14,825,000	98.35
		4	Jumlah PPK desa / kelurahan aktif	12 PKK	111,900,000	12 PKK	100%	110,866,605	99.08
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan	1	Prosentase pelanggaran trantibmas yang ditangani	100%	15,622,500	100%	100%	15,600,000	99.86
		2	Jumlah petugas Linmas kecamatan, kelurahan dan desa	100 org	153,472,500	100 org	100%	153,109,000	99.76
4	Meningkatnya Akuntabelitas Kinerja Kecamatan	1	Nilai AKIP Kecamatan	70	29,138,100	70	93%	29,094,400	99.86
		2	Prosentase temuan BPK/Isfektorat yang ditindak lanjuti	100%	0	100%	100%	0	-
	<b>Nilai rata – rata pencapaian / realisasi anggaran</b>				<b>10,062,257,075</b>		<b>100%</b>	<b>9,805,473,385</b>	<b>97.45</b>

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja sasaran dalam nilai rata – rata capaian indikator kinerja sasaran target kinerja 99% sedangkan realisasi anggaran untuk mencapai target sebesar 97.45% masih ada penghematan / efesensi anggaran sebesar 2.55 % atau terdapat silva sebaesar Rp 256,783,690.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan analisa yang telah dikemukakan, Diperoleh Beberapa Kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Mentawa Baru Ketapang disusun sebagai wujud dukungan terhadap sistem administrasi yang diharapkan mampu menjamin kelancaran dan keserasian tugas aparatur dalam jangka waktu 1 ( satu ) tahun.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat stimulasi dalam mewujudkan good governance dan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat/publik.
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berfungsi sebagai parameter atau ukuran yang dapat menunjukkan, menentukan, memberi suatu ide atau memberikan dasar untuk mengambil kesimpulan atas sesuatu.
4. Dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/peñanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
5. Dari 4 (empat) sasaran indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam pengukuran kinerja, sebanyak 4 (empat) sasaran indikator kinerja realisasinya sesuai dengan target atau kegiatan terlaksana dengan baik dan ada 1 (satu) sasaran indikator kinerja hasilnya sangat memuaskan atau sangat berhasil dan 3 (tiga) sasaran indicator kinerja hasilnya juga baik dalam kategori berhasil.

### **B. SARAN**

Dalam pengumpulan dan penyusunan Data Laporan Kinerja Pemerintah Daerah secara maksimal karena masing-masing bagian kurangnya sumber daya aparatur pendidikan formil maupaun diklat, kurangnya motivasi pegawai dalam segala bentuk kegiatan Guna mewujudkan indikator kinerja sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan atau belum maksimal realisasinya, pada waktu yang akan datang akan ditempuh berbagai langkah sebagai berikut :

1. Mempertajam penyusunan rencana biaya/anggaran melalui RKA / RKT dan DPA dengan melibatkan semua aparatur yang terkait.
2. Melakukan evaluasi per triwulan atau per semester atau setiap akhir tahun anggaran dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi internal dan eksternal secara intensif dengan pihak Kelurahan dan masyarakat se Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
4. Membuat dokumentasi, pencatatan dan pengarsipan khusus atas semua data yang diperlukan dalam penyusunan LKIP.
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur/staf dengan mengikut sertakan dalam Diklat LKIP atau Diklat, bimbingan teknis lainnya yang diperlukan
6. Secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana kerja guna menunjang kelancaran aktifitas pelayanan kepada publik.

Penyusunan LKIP Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur ini masih belum sempurna, karena itu perlu sarna/masukan yang positif pada masa yang akan datang.